

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Indonesia dengan 40% penduduknya bermata pencaharian dari pertanian, Indonesia merupakan negara agraris. Mengingat sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian dan dikelilingi oleh pegunungan yang subur, Indonesia merupakan negara agraris. Berkat lingkungan tropis Indonesia, yang memungkinkan pelapukan batuan yang ideal dan menyuburkan tanah, lahan pertanian negara ini subur. Dengan 17.508 pulau dan luas daratan 1.922.570 km<sup>2</sup>, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Oleh karena itu, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara agraris terbesar di dunia. Di negara agraris seperti Indonesia, pertanian sangat penting bagi perekonomian dan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk, terutama seiring pertumbuhan penduduk dan meningkatnya permintaan pangan. Selain itu, karena mayoritas penduduk kini hidup di bawah garis kemiskinan, sektor pertanian berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Ayun, et al., 2020).

Semua produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air yang berasal dari sumber biologis—baik yang diolah maupun tidak—yang ditujukan untuk konsumsi manusia dianggap sebagai pangan. Ini termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. (UU No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, 2012) mengatur fokus penyelesaian masalah pangan berdasarkan asas bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling penting dan pemenuhan kebutuhan tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen fundamental untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang setiap saat melalui pemanfaatan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.

Sejak Deklarasi KTT Pangan Dunia diresmikan di Roma pada tahun 1996, berbagai upaya telah dilakukan di seluruh dunia untuk mengurangi kerawanan pangan. Berdasarkan deklarasi ini, negara-negara peserta akan bekerja sama untuk mengurangi separuh kerawanan pangan global pada tahun 2015. Untuk mengatasi kemiskinan dan kelaparan, yang juga merupakan faktor penentu penting dalam memenuhi kebutuhan pangan, Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) diperkenalkan pada tahun 2000. Pada tahun 2015, deklarasi ini bertujuan untuk mencapai pembangunan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. (Sari, 2019).

Ketidakamanan pangan saat ini merupakan masalah pangan yang paling umum. Ketidakamanan pangan yang parah dapat mengakibatkan kelaparan, yang dapat menyebabkan penurunan berat badan karena ketersediaan pangan dan/atau daya beli. Antitesis dari ketahanan pangan adalah ketidakamanan pangan, yang terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang di suatu wilayah tidak dapat

mengakses cukup pangan yang layak untuk hidup sehat dan melakukan aktivitas yang layak. (Sari, 2019).

Badan Ketahanan Pangan (Purwantini, 2016) mendefinisikan bahwa kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.

Sumarmi (Purwantini, 2016) menegaskan bahwa "kerawanan pangan" merupakan antitesis dari "ketahanan pangan". Frasa ini sering diartikan secara halus sebagai "ketahanan pangan yang menurun", tetapi konotasinya hampir identik.

Ketahanan pangan dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori: sementara dan kronis. Ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok anggotanya dalam jangka waktu yang panjang akibat keterbatasan kepemilikan lahan, aset produktif, dan pendapatan yang tidak memadai dikenal sebagai kerawanan pangan kronis (Purwantini, 2016).

Di sisi lain, kerawanan pangan sementara mengacu pada kejadian kerawanan pangan yang tiba-tiba dan sementara. Ketahanan yang menurun, standar hidup rumah tangga yang menurun, dan bahkan kerawanan pangan kronis dapat diakibatkan oleh kerawanan pangan sementara yang berkepanjangan.

Salah satu dari banyak penyebab masalah pangan di Indonesia adalah pertumbuhan penduduk yang pesat. Kelangkaan pangan diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk yang pesat dan peningkatan konsumsi pangan. Dengan

270 juta penduduk, Indonesia merupakan negara terpadat keempat di dunia dan dikategorikan sebagai negara berpenghasilan menengah ke bawah.

Menurut Indeks Kelaparan Global, Indonesia berada pada peringkat ke-73 dari 116 negara pada tahun 2021, dengan 22,9 juta orang hidup dalam kerawanan pangan dan prevalensi kekurangan gizi sebesar 8,49%. (Alsafana Rasman, Eliza Sinta Theresia, 2023 hal: 37).

Selain faktor pertumbuhan penduduk yang tinggi, munculnya kerawanan dan krisis pangan yang menyebabkan kekurangan gizi ini disebabkan oleh adanya keterbatasan lahan pertanian dan kurangnya akses ke sumber air yang berkualitas, akibat perubahan iklim, yang mempengaruhi produktivitas pertanian di Indonesia (Alsafana Rasman, Eliza Sinta Theresia, 2023 hal: 37). Perubahan iklim juga berkontribusi terhadap bencana alam Indonesia, termasuk kekeringan, tanah longsor, dan banjir, kebakaran lahan dan hutan. Hal ini mengakibatkan penurunan produksi pangan, kenaikan harga pangan, dan terganggunya akses distribusi pangan.

Fenomena kontradiktif antara Indonesia sebagai negara agraris dan masih adanya permasalahan pangan dapat dilihat dari berbagai faktor yang memengaruhi ketahanan pangan, seperti pertumbuhan penduduk yang tinggi, alih fungsi lahan pertanian, perubahan iklim, serta ketimpangan akses terhadap sumber daya pangan. Sektor pertanian memiliki kontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan pemenuhan kebutuhan pokok penduduk Indonesia (Alsafana Rasman, Eliza Sinta Theresia, 2023 hal: 37).

Namun, di sisi lain, sekitar 14,5% dari total populasi atau sekitar 30 juta orang di Indonesia yang mengalami kekurangan gizi (Alsafana Rasman, Eliza Sinta Theresia, 2023 hal: 37). Angka tersebut merupakan angka yang cukup tinggi dan menunjukkan bahwa masalah krisis pangan masih terjadi di Indonesia. Hal ini menjadi sangat kontradiktif mengingat Indonesia sebagai negara agraris terbesar di Asia Tenggara.

Ketidakamanan pangan di Sulawesi Tengah meningkat tajam pada tahun 2023. Data Atlas Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Sulawesi Tengah tahun 2022 (Pakan, 2007), bahwa ada peningkatan daerah rawan pangan dimana pada tahun 2022 untuk Prioritas 1 (sangat rawan) meningkat sebanyak 25 kecamatan dari 4 kecamatan di tahun 2021, sedangkan untuk Prioritas 2 (rawan) meningkat sebanyak 26 kecamatan tahun 2022 dari 10 kecamatan tahun 2021 dan untuk Prioritas 3 (agak rawan) juga meningkat sebanyak 35 kecamatan pada tahun 2022 dari sebanyak 27 kecamatan di tahun 2021.

Salah satu daerah yang menghadapi masalah kerawanan pangan adalah Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Berdasarkan data dari *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA 2023) Sulawesi Tengah tahun 2023, daerah ini mengalami peningkatan signifikan dalam kategori rawan pangan, dengan banyaknya masyarakat yang masih kesulitan mengakses pangan yang cukup dan bergizi.

Di Desa Walandano, Kecamatan Balaesang Tanjung, akses terhadap bahan pangan sangat terbatas akibat kondisi geografis yang sulit dijangkau dan infrastruktur distribusi yang belum memadai. Akibatnya, harga pangan cenderung lebih tinggi dibandingkan daerah lain, sehingga daya beli masyarakat semakin rendah dan berujung pada permasalahan kesejahteraan sosial.

Keadaan aman, terlindungi, tenang, puas terhadap hidup, dan sejahtera disebut kemakmuran. ( Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Baru, 2012 dalam Watunglawar & Leba, 2020 hal: 15). Kesejahteraan dalam konsep dunia modern dapat dimengerti sebagai sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, seperti kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya (Watunglawar & Leba, 2020 hal: 15).

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kabupaten Donggala mencapai 11,36% pada tahun 2023, menandakan adanya tantangan dalam memastikan semua warga memiliki akses yang cukup terhadap pangan (Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, 2023).

Kerawanan pangan di Donggala dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain (Pakan, 2007):

1. Tidak meratanya distribusi pangan
2. Harga pangan rata-rata cukup tinggi
3. Belum tersedianya transportasi khusus pangan

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berinisiasi program Terminal dan Transportasi Pangan Terpadu (TETRA PANDU). Program ini dirancang untuk memperbaiki sistem distribusi pangan dengan menyediakan sarana transportasi dan infrastruktur logistik yang lebih baik, sehingga dapat menekan harga pangan serta meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap bahan pangan. TETRA PANDU diharapkan menjadi model intervensi yang efektif dalam mengurangi kerawanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di daerah rawan pangan.

Program ini ingin didesain sebagai sebuah model (praktik terbaik) bagi desa-desa Sulawesi Tengah lainnya dalam upaya bersama untuk menurunkan proporsi wilayah yang mengalami kerawanan pangan secara lebih cepat dan efisien.

Desa-desa dalam proyek percontohan akan mendapatkan intervensi sebagai bagian dari implementasi pendekatan terpadu ini. Tingkat keberhasilan akan diukur terutama signifikansi pemanfaatan dana yang digunakan berbanding keberhasilan persentase daerah rawan pangan yang berhasil menuju daerah tahan pangan.

Melalui metode PAR, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga memberikan peluang bagi masyarakat dan pemerintah desa untuk melakukan refleksi terhadap efektivitas program TETRA PANDU. Dengan metode ini, penelitian tidak hanya menghasilkan kajian akademis tetap juga berkontribusi dalam memecahkan permasalahan kerawanan pangan secara nyata di Desa Walandano melalui peran aktif masyarakat dalam perbaikan kebijakan dan implementasi program.

Berdasarkan penjelasan latar belakang, Ketertarikan peneliti terhadap penelitian ini yaitu dari keprihatinan terhadap ketimpangan distribusi pangan yang terjadi di desa-desa terpencil. Desa Walandano, dengan kondisi geografisnya yang sulit dijangkau, sering menghadapi kendala dalam akses terhadap bahan pangan. Hal ini tidak hanya memengaruhi ketersediaan pangan tetapi juga berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

## **B. Fokus penelitian**

Mengingat konteks di atas, penelitian ini berfokus pada implementasi Program Terminal dan Transportasi Pangan Terpadu (TETRA PANDU) sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di Desa Walandano, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala.

Dari fokus penelitian diatas, diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Program TETRA PANDU dalam mengatasi permasalahan kerawanan pangan di Desa Walandano?
2. Bagaimana perubahan kerawanan pangan yang dialami masyarakat Desa Walandano sebelum dan sesudah implementasi Program TETRA PANDU?

3. Bagaimana hasil Program TETRA PANDU terhadap kesejahteraan sosial masyarakat di Desa Walandano?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui implementasi Program TETRA PANDU dalam mengatasi permasalahan kerawanan pangan di Desa Walandano
2. Untuk mengetahui perubahan kerawanan pangan yang dialami masyarakat Desa Walandano sebelum dan sesudah implementasi Program TETRA PANDU
3. Untuk mengetahui hasil Program TETRA PANDU terhadap kesejahteraan sosial masyarakat di Desa Walandano

### **D. Kegunaan Penelitian**

Peneliti mengharapkan bahwa ini memberikan manfaat baik secara praktis maupun akademis. Dari sudut pandang akademis, penelitian ini diharapkan dapat dapat bisa memperkaya kajian akademis di bidang kesejahteraan sosial dan pengembangan masyarakat, khususnya terkait intervensi melalui program bantuan pangan terpadu dan juga dapat menjadi rujukan bagi penelitian lain yang ingin mendalami topik bantuan pangan dan sistem transportasi pangan terpadu.

Sementara itu, secara praktis, penelitian ini seharusnya dapat memberikan rekomendasi konkret untuk meningkatkan implementasi program tetra pandu, sehingga lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat yang terlibat.

Hasil penelitian ini harus menjadi dasar untuk memperbaiki distribusi dan akses pangan, yang akan membantu penduduk miskin dalam memenuhi kebutuhan gizi mereka pangan dengan lebih mudah.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **E.1 Hasil Penelitian Sebelumnya**

*Pertama*, (Arghniya, 2022) dengan judul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Kerawanan Pangan Masyarakat Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar” penelitian yang dilakukan menyoroti peran pemerintah daerah dalam menangani kerawanan pangan di masyarakat. Penelitian ini menekankan pentingnya intervensi pemerintah melalui program lokal seperti lumbung pangan.

Selain itu juga, penelitian ini menggunakan pendekatan kebijakan publik untuk menilai bagaimana implementasi program tertentu dapat berkontribusi terhadap ketahanan pangan.

*Kedua*, (Rujiah, 2021) dengan judul “Analisis Tingkat Ketahanan Pangan Terhadap Kerawanan Pangan di Kabupaten Indragiri Hilir” penelitian ini membahas pentingnya ketahanan pangan di Kabupaten Indragiri Hilir, yang menghadapi tantangan akibat konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian.

Penurunan produktivitas pertanian dan ketidakcukupan pangan menjadi fokus utama, mengingat bahwa ketahanan pangan dipengaruhi oleh ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan serta kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Indragiri Hilir sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial ekonomi, konversi lahan, dan akses terhadap sumber pangan. Rekomendasi untuk meningkatkan ketahanan pangan juga mencakup perlunya kebijakan pemerintah yang lebih baik dan program pembangunan yang mendukung sektor pertanian.

Berdasarkan pada penelitian terdahulu terdapat Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan tersebut adalah membahas tentang peran pemerintah dalam menanggulangi kerawanan pangan, sama-sama memfokuskan pada aspek ketahanan pangan dalam kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat.

Fokus ini serupa dengan penelitian peneliti, yang menitikberatkan pada aspek kesejahteraan sosial melalui peningkatan akses dan pengelolaan pangan serta menyoroti peran kebijakan pemerintah daerah, seperti yang dilakukan dalam penelitian (Arghniya, 2022), yang melihat implementasi kebijakan berdasarkan Peraturan Bupati mengenai pengelolaan cadangan pangan, serta penelitian (Rujiah, 2021) yang mengidentifikasi peran kebijakan daerah dalam mengatasi kerawanan pangan dengan strategi ketersediaan pangan dan analisis spasial.

Penelitian ini pun menilai implementasi program TETRA PANDU sebagai kebijakan intervensi pangan untuk kesejahteraan masyarakat. Sedangkan perbedaannya yaitu objek wilayahnya. Penelitian terdahulu dilakukan di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dan Kota Jantho, Aceh Besar, yang masing-masing memiliki kondisi sosial ekonomi serta potensi pangan yang berbeda dengan wilayah penelitian peneliti.

Program TETRA PANDU mungkin memiliki karakteristik yang berbeda dalam kesejahteraan dan dampaknya dibandingkan dengan program lokal di wilayah tersebut serta Penelitian (Arghniya, 2022) lebih berfokus pada pengelolaan cadangan pangan melalui pembangunan lumbung dan pemanfaatan gabah, sedangkan dalam penelitian (Rujiah, 2021) menitikberatkan pada

ketahanan pangan yang didukung oleh indikator akses, distribusi, dan pemanfaatan pangan.

Dalam penelitian peneliti, kesejahteraan masyarakat ditekankan melalui pendekatan bantuan program TETRA PANDU yang mencakup penyediaan pangan yang lebih terstruktur melalui dukungan infrastruktur transportasi. Ini memberikan penelitian peneliti melakukan pendekatan holistik yang lebih luas dalam melihat kesejahteraan sosial melalui peningkatan akses pangan yang difasilitasi oleh sistem transportasi.

## **E.2 Landasan Teoritis**

Landasan teoritis penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan, teori kesejahteraan sosial, dan teori ketahanan pangan. Teori implementasi kebijakan menekankan pada pelaksanaan Program TETRA PANDU sesuai standar dan tujuan, teori kesejahteraan sosial menilai dampaknya terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat, sedangkan teori ketahanan pangan melihat perubahan kondisi pangan sebelum dan sesudah program. Ketiga teori ini menjadi pijakan dalam menganalisis keterkaitan antara implementasi program, kesejahteraan sosial, dan ketahanan pangan di Desa Walandano.

Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *“to Implement”* berarti *to provide the means for carryng out* (untuk menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect* (untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Implementasi menurut Widodo berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan yang dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu (Abdul Mahsyar dkk, 2021:116).

Menurut Fixsen dkk. (dalam Dunst dkk, 2013, hlm.88) mengemukakan bahwa implementasi sebagai penetapan serangkaian aktivitas yang dirancang untuk ditempatkan dalam kegiatan atau program yang diketahui dimensinya.

Hal ini berarti bahwa implementasi merupakan proses sebuah program yang berupa rangkaian aktivitas diterapkan di lapangan yang diketahui dimensinya, bukan hanya sebatas dipandang dari teori semata (Rahayu, 2018).

Teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh lima variabel utama, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi dan politik. Jika aspek-aspek ini berjalan baik, maka suatu program dapat di implementasikan secara efektif.

Selain itu, teori ketahanan pangan, mengingat tujuan utama Program TETRA PANDU adalah mengurangi kerawanan pangan. *Food and Agriculture Organization of The United Nations* (FAO) 1996 mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kondisi ketika setiap individu, setiap saat, memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi. Empat dimensi yang ditekankan adalah ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas pangan. Oleh karena itu, penelitian ini memanfaatkan teori ketahanan pangan untuk membandingkan kondisi masyarakat Desa Walandano sebelum dan sesudah implementasi Program TETRA PANDU.

Kerangka ini diperkuat dengan kesejahteraan sosial yang menjadi indikator penting untuk menilai keberhasilan program. Undang-Undang No 11 Tahun 2009 mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar masyarakat dapat hidup layak serta menjalankan fungsi sosial. Dalam Mohammad Suud (2006:5) kesejahteraan sosial menurut Segal dan Brzuzny adalah keadaan sejahtera dari suatu masyarakat termasuk kesehatan, status ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup. Teori ini menjadi dasar untuk menilai sejauh mana Program TETRA PANDU mengalami perubahan pada kualitas hidup masyarakat Desa Walandano.

Dengan menggabungkan teori implementasi kebijakan, kesejahteraan sosial, dan ketahanan pangan, penelitian ini memiliki pijakan konseptual yang kuat untuk menilai efektivitas Program TETRA PANDU dalam mengatasi kerawanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di Desa Walandano.

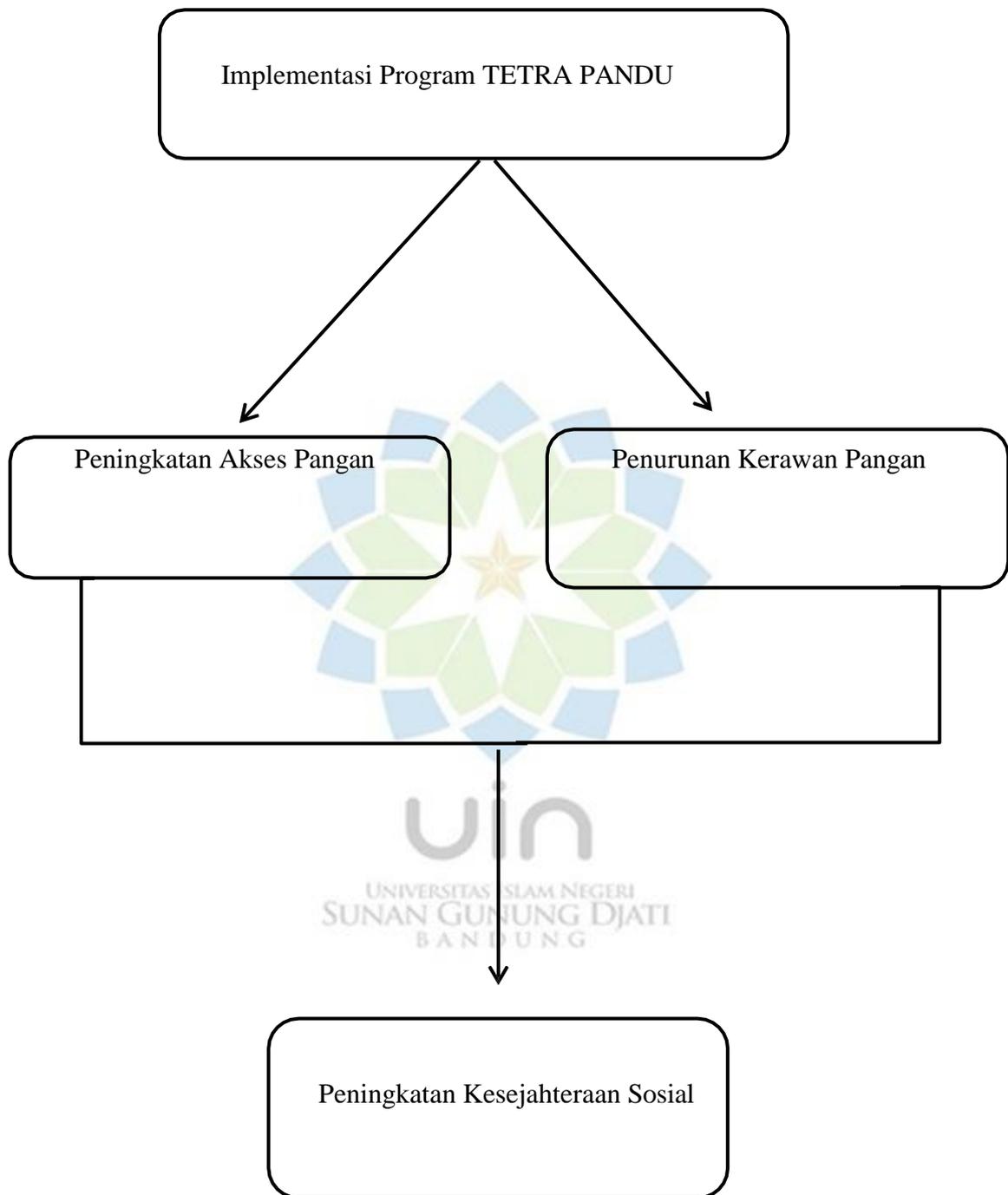
Penelitian tindakan didefinisikan sebagai penelitian yang didasarkan pada tindakan nyata dengan mendorong keterlibatan masyarakat dalam pemecahan masalah dan desain program yang sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Tujuannya adalah memberdayakan masyarakat. Biasanya riset aksi lebih populer dikalangan LSM dan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang pembangunan.

Menurut Yolanda Wadworth (Sibyani, 2013), *Participatory Action Research* (PAR) adalah istilah yang memuat seperangkat asumsi yang mendasari paradigma baru ilmu pengetahuan dan bertentangan dengan paradigma pengetahuan tradisional atau kuno.

Untuk mencapai temuan tentang "apa kasusnya" dan "apa implikasinya terhadap perubahan" yang dianggap bermanfaat oleh berbagai individu dalam situasi bermasalah, asumsi baru ini menyoroti pentingnya proses sosial dan kolaboratif dalam menghasilkan penelitian pendahuluan. (Agus afandi, dkk, Modul Participatory Action Reseach (PAR) (IAIN Sunan Ampel Surabaya: Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) 2013) hal. 41).



### E.3 Kerangka Konseptual



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

### **F.1 Lokasi Penelitian**

Pemilihan lokasi penelitian di Desa Walandano, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala, didasarkan pada beberapa faktor utama yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pertama, Desa Walandano adalah salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan pangan tertinggi, sebagaimana ditunjukkan dalam data atlas Ketahanan dan Kerentanan Pangan (KKP) Sulawesi Tengah 2022, dimana jumlah kecamatan yang masuk kategori sangat rawan pangan meningkat secara signifikan. Hal ini menunjukkan kesulitan yang dihadapi penduduk desa ini dalam mendapatkan cukup makanan yang sehat dan bergizi.

Kedua, kondisi geografis Desa Walandano yang sulit dijangkau menyebabkan aksesibilitas pangan yang terbatas. Distribusi pangan di daerah ini belum merata akibat minimnya infrastruktur transportasi yang memadai. Akibatnya, masyarakat menghadapi harga pangan yang relatif tinggi, yang berdampak pada daya beli dan kesejahteraan ekonomi rumah tangga.

Ketiga, Desa Walandano menjadi lokasi yang relevan dengan program TETRA PANDU yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengatasi permasalahan rawan pangan. Dengan memilih lokasi ini, peneliti dapat menganalisis secara langsung efektivitas program tersebut dalam meningkatkan akses pangan dan kesejahteraan sosial masyarakat setempat.

Selain itu, peneliti juga bertujuan untuk memahami dampak sosial dan ekonomi dari kondisi rawan pangan terhadap kehidupan masyarakat di Desa Walandano. Dengan menggali lebih dalam tantangan serta potensi yang ada,

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memajukan upaya secara signifikan. Penyelesaian masalah pangan di daerah rawan serta menjadi rekomendasi bagi kebijakan intervensi pangan di wilayah lain dengan karakteristik serupa.

## **F.2 Paradigma dan Pendekatan**

Menurut Creswell et al., (2014) Paradigma konstruktif dalam penelitian adalah pemahaman yang mendalam mengenai cara individu memandang dan melihat lingkungan sekitarnya, serta bagaimana interaksi sosial membentuk persepsi tersebut terhadap fenomena yang diteliti.

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah konstruktif karena untuk memahami bagaimana masyarakat di Desa Walandano membangun pemahaman tentang kerawanan pangan dan bagaimana mereka menginterpretasikan program TETRA PANDU dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.

Sedangkan pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu pendekatan partisipatif. Pendekatan partisipatif diterapkan untuk menggali bagaimana masyarakat Desa Walandano berperan dalam menyelesaikan permasalahan kerawanan pangan melalui keterlibatan mereka dalam program TETRA PANDU.

## **F.3 Metode Penelitian**

*Participatory Action Research* merupakan campuran dari penelitian sosial, aktivitas pembelajaran, serta perilaku politik, berpartisipasi dalam konteks metodologi materialistik historis yang diartikan oleh Kasam sebagai penelitian yang terorganisir secara demokratis (Aziz et al., 2022: hal 25). Pada dasarnya, PAR merupakan penelitian yang melibatkan secara aktif semua pihak-pihak yang

relevan (stakeholders) dalam mengkaji tindakan yang sedang berlangsung (dimana pengalaman mereka sendiri sebagai persoalan) dalam rangka melakukan perubahan dan perbaikan ke arah yang lebih baik.

Pendekatan Penelitian Aksi Partisipatif (PAR) digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan ini digunakan karena peneliti berupaya memahami sekaligus berkontribusi terhadap perubahan sosial yang terjadi di Desa Walandano, khususnya dalam implementasi Program Terminal dan Transportasi Pangan Terpadu (TETRA PANDU).

#### **F.4 Jenis Data dan Sumber Data**

##### **F.4.1 Jenis Data**

Data yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data tentang implementasi Program TETRA PANDU dalam mengatasi permasalahan kerawanan pangan di Desa Walandano
- 2) Data tentang perubahan kerawanan pangan yang dialami masyarakat Desa Walandano sebelum dan sesudah implementasi Program TETRA PANDU
- 3) Data tentang hasil Program TETRA PANDU terhadap kesejahteraan sosial masyarakat di Desa Walandano

##### **F.4.2 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

- 1) Untuk mendapatkan data tentang implementasi Program TETRA PANDU dalam mengatasi permasalahan kerawanan pangan di Desa Walandano didapatkan dari Pemerintah Daerah atau Instansi terkait.

2) Untuk mendapatkan data tentang perubahan kerawanan pangan yang dialami masyarakat Desa Walandano sebelum dan sesudah implementasi Program TETRA PANDU didapatkan dari masyarakat Desa Walandano.

3) Untuk mendapatkan data tentang hasil Program TETRA PANDU terhadap kesejahteraan sosial masyarakat di Desa Walandano didapatkan dari tim pelaksana program TETRA PANDU.

## **F.5 Informan atau Unit Analisis**

### **F.5.1 Informan**

Informan penelitian ini adalah organisasi-organisasi yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam implementasi program TETRA PANDU di Desa Walandano diantaranya yaitu masyarakat Desa Walandano yang mengalami dampak langsung dari program TETRA PANDU, petani dan pelaku usaha kecil yang bergantung pada distribusi pangan serta pemerintah atau pemangku kebijakan yang mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Walandano.

### **F.5.2 Teknik Penentuan Informan**

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan relevansi pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan mereka dalam pelaksanaan program TETRA PANDU. Informan utama yang dilibatkan antara lain Dinas BAPPEDA, Dinas Sosial, Kepala Desa, serta Fasilitator program TETRA PANDU, karena dianggap memiliki pemahaman menyeluruh terkait tujuan, mekanisme, dan dampak program.

Selain itu, untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif, peneliti juga melibatkan masyarakat penerima manfaat seperti petani, nelayan, serta warga yang merasakan langsung dampak program. Dengan demikian, data yang diperoleh mencerminkan sudut pandang pelaksana sekaligus pengalaman nyata masyarakat, sehingga hasil penelitian lebih objektif dan dapat dipertanggung jawabkan secara akademik.

## **F.6 Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Observasi Partisipatif**

Observasi adalah teknik untuk mengumpulkan informasi menggunakan indera manusia, klaim Matthew dan Ross (2010). (Firdausi, 2020). Sedangkan observasi partisipatif menurut Sanafiah Faisal (dalam Sugiyono, 2017, hlm.226) Observasi partisipan, dimana peneliti melakukan observasi ini terlibat dengan orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.

Sambil melakukan pengamatan peneliti ikut melakukan apa saja yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh lebih lengkap dan tajam sehingga memudahkan memperoleh data yang akurat (Yulistiawaty, 2020).

Untuk mendapatkan data tersebut, peneliti langsung mengamati apa yang dilihat di lapangan. Peneliti melakukan observasi secara langsung di Desa Walandano Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala yang menjadi lokasi dari objek penelitian dan pengamatan pada kegiatan pengimplementasian bantuan TETRA PANDU di Kabupaten Donggala.

## 2. Wawancara

Menurut Tersiana (2018:12) wawancara merupakan cara pengumpulan data pada penelitian yang digunakan untuk mengetahui hal-hal secara mendalam. Wawancara dilakukan melalui tanya-jawab secara langsung dengan subjek yang berkontribusi secara langsung dengan objek yang digunakan sebagai penelitian (Yulistiawaty, 2020).

Pada proses wawancara ini, peneliti sebagai pewawancara melakukan wawancara kepada beberapa pihak, terdiri dari pemerintah desa walandano, perangkat daerah terkait, dan masyarakat desa walandano kabupaten donggala sebagai narasumber, dengan mengutarakan berbagai pertanyaan yang dibutuhkan, lalu meminta keterangan dan kejelasan berkaitan dengan masalah penelitian.

## 3. Dokumentasi

Observasi langsung digunakan dalam dokumentasi untuk mengumpulkan informasi yang digunakan peneliti untuk mendukung temuan mereka. Sugiyono (2017:240) menegaskan bahwa studi dokumentasi merupakan pelengkap yang bermanfaat bagi teknik penelitian kualitatif seperti observasi dan wawancara. (Education et al., 2021). Dalam hal ini, peneliti mengamati data yang tertulis, foto, atau bukti lain yang terkait dengan implementasi program TETRA PANDU.

## 4. *Focus Group Discussion* (FGD)

Teknik pengumpulan data dan informasi secara metodis tentang suatu masalah yang sangat spesifik melalui percakapan atau diskusi kelompok yang dilakukan secara metodis dan terfokus pada isu atau masalah tertentu dikenal

sebagai diskusi kelompok terfokus (FGD) atau diskusi kelompok terfokus. (Irwanto, 2006 dalam Murdiyanto, 2020).

Dalam hal ini, peneliti melakukan Diskusi Kelompok Terarah (FGD) dengan pemangku kepentingan terkait seperti Pemerintah Desa Walandano sebagai pihak yang memiliki peran dalam pelaksanaan program TETRA PANDU dan memahami kondisi kesejahteraan masyarakat setempat, perangkat daerah terkait yakni instansi atau lembaga pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan distribusi pangan dan kesejahteraan sosial di kabupaten donggala serta masyarakat Desa Walandano sebagai penerima manfaat langsung dari program TETRA PANDU yang dapat memberikan perspektif terkait dampak program terhadap kesejahteraan mereka.

#### **F.7 Teknik Penentuan Keabsahan Data**

Dalam penelitian ini, teknik triangulasi data dapat digunakan untuk meningkatkan keabsahan dan validitas temuan penelitian. Menurut (Mantja 2007:84 dalam Vina Nurfitriana Utami, 2021) Selain itu, konsistensi antar-metode, seperti observasi dan wawancara, atau penerapan metode yang sama, seperti wawancara dengan banyak informan, dapat dipastikan melalui triangulasi.

Pengujian data dari berbagai sumber yang akan digunakan untuk mengumpulkan data dikenal sebagai triangulasi sumber. Dengan membandingkan data yang dikumpulkan selama penelitian dengan berbagai sumber atau informan, triangulasi sumber dapat meningkatkan reliabilitas data dan memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan dari data yang telah dievaluasi dari berbagai sumber. (Sriwijaya, 2020 hal: 149).

Penelitian ini menggunakan triangulasi jenis sumber, seperti:

- 1) Wawancara dengan Pemerintah Daerah dan pengelola program TETRA PANDU guna mendapatkan perspektif kebijakan dan efektivitas program.
- 2) Wawancara dengan masyarakat Desa Walandano untuk memahami kondisi sosial ekonomi dan dampak program TETRA PANDU secara langsung
- 3) Observasi langsung terhadap implementasi program di lapangan untuk melihat secara nyata dampak dan kendala yang dihadapi.

## **F.8 Teknik Analisis Data**

### **1. Reduksi Data**

Salah satu komponen analisis adalah reduksi data. Reduksi data adalah jenis analisis yang menyederhanakan, mengkategorikan, memfokuskan, menghilangkan informasi yang tidak relevan, dan menyusun data sehingga kesimpulan dapat ditarik dan dikonfirmasi. (Sutopo & Kualitatif, 2002).

### **2. Penyajian Data**

Penyajian data adalah langkah selanjutnya, di mana data yang telah diringkas disusun secara metodis untuk pemahaman dan analisis lebih lanjut. Ada banyak cara untuk menyajikan data, termasuk tabel, grafik, infografis, dan narasi deskriptif.

Miles & Huberman (Sutopo & Kualitatif, 2002) membatasi suatu penyajian sebagai kumpulan data terorganisasi yang darinya keputusan dan tindakan dapat diambil.

### 3. Kesimpulan dan Verifikasi

Membuat inferensi hanyalah salah satu aspek dari konfigurasi yang lengkap, klaim Miles & Huberman. Selama penelitian, kesimpulan juga dikonfirmasi. Verifikasi Hal itu bisa secepat pemikiran yang muncul di benak analis (peneliti) ketika menulis atau tinjauan catatan lapangan, atau bisa juga menyeluruh dan menyita waktu seperti beberapa kali upaya untuk mengulangi suatu temuan pada kumpulan data berbeda atau sebanyak diskusi dan tinjauan di antara kolega untuk membangun kesepakatan intersubjektif.(Sutopo & Kualitatif, 2002).

